

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian demokrasi secara etimologis berasal dari dua kata. *Pertama* kata “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat. *Kedua*, kata “cratein” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Jadi “demos-cratein” atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu berarti kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Manusia dan masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari suatu kawasan tertentu.¹

Sebetulnya penelitian mengenai *lopo* sebagai simbol demokrasi lokal, hal itu bukanlah sesuatu yang baru. Alasannya, beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji hal yang sama, walau mungkin dengan dan dalam perspektif berbeda. Peneliti pertama Hend Saunoah dkk (2006) membahas topik "Lopo, Representasi Sistem Budaya "Atoin Meto" TTU". Peneliti kedua bernama Venansius S. Luni tentang "Lopo Sebagai Simbol Demokrasi Lokal pada Desa Letmafo". Berikut ini beberapa penjelasan mengenai penelitian-penelitian tersebut, yang telah dilakukan

Adapun penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui beberapa pokok yang diklaim sebagai hal-hal penting dalam masyarakat. *Pertama*, cikal bakal arti dan fungsi serta makna yang terkandung dalam bangunan *lopo*. *Kedua*, mengkaji lebih dalam proses pembentukan dan pembuatan *lopo* yang terkesan primitif dan *vernacular*. Hal seperti inilah yang memberi sumbangan dari hasil penelitian

¹Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*:151-162

tersebut. *Ketiga*, mengetahui keterikatan sosio-religi antara lingkungan pembangunan lopo dan proses pemanfaatan.

Hal yang terjadi pada penelitian kedua hampir sama dengan yang pertama, namun tekanan agak berbeda seperti dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Adapun tujuan dari penelitian kedua adalah *pertama*, untuk mendeskripsikan lopo sebagai simbol demokrasi lokal. *Kedua*, untuk mencatat dan menjelaskan makna serta nilai-nilai yang terkandung dalam istilah *lopo* sebagai simbol demokrasi lokal dalam kehidupan masyarakat *Atoin Meto*.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa lopo masih memiliki nilai-nilai budaya yang mencerminkan kehidupan sosial budaya masyarakat. Dalam arti *lopo* sebagai cikal bakal dari arti dan makna budaya secara umum. Karena itulah arsitektur *lopo Atoin Meto* merupakan suatu bentuk personifikasi, sehingga arti yang terkandung dari balik kata *lopo* sebetulnya merupakan wujud representasi dari konsep diri (*self-concept*) *Atoin Meto*. Konsep diri ini tidak saja tertuju pada pengetahuan pribadi masing-masing subyek, melainkan juga masyarakat sebagai seorang pribadi yang memiliki ciri sosial tertentu.

Hal menarik dijelaskan dalam penelitian tersebut mengenai konsepsi diri itu sendiri terdiri, yang biasanya merangkumi 3 (tiga) komponen. *Pertama*, apa yang biasanya disebut dengan istilah 'diri ideal' (*self-ideal*); yang berikut *kedua* biasanya dikenal dengan istilah 'citra diri' (*self-image*) dan yang terakhir *ketiga* dikenal dengan nama 'harga diri' (*self-esteem*).²

²Ibid hlm 89

Berbeda dengan hasil penelitian kedua yang justru menunjuk fungsi dan peran umum dari *lopo* sebagai tempat interaksi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan atau masalah tanah. Itu berarti *lopo* ditempatkan pada posisi sebagai pusat nilai sosial yang dengan sendirinya melekat pada proses pembentukan kepribadian *Atoin Meto*. Dalam penelitian kedua ini upaya tertuju pada merefleksikan makna sosial dari *lopo* itu sendiri, yakni bagi peremajaan relasi atau jejaring sosial di antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan di sini bahwa dari hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat persamaannya dengan penelitian kami, yakni sama-sama mengkaji citra *lopo* sebagai simbol budaya. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hen Saunoah dkk lebih mengkaji tentang tipologi dan proses pembuatan *lopo* serta konsep dan nilai yang terkandung dalam konstruksi. Sedangkan rencana penelitian kami ini lebih mengkaji tentang peran *lopo* sebagai simbol demokrasi lokal pada masyarakat Desa Taekas, sebagai pusat nilai sosial, kebudayaan, etika dan norma.

Hal sangat tipikal dalam penelitian kami adalah melihat sosok *lopo* sebagai bangunan budaya dengan mengkaji arti dan fungsi bagi peremajaan demokrasi dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Kemudian, lokasi penelitian ini juga hanya terbatas pada Desa Taekas, sehingga beberapa istilah yang digunakan di sini juga dalam cara berpikir masyarakat Desa Taekas yang sama. Itu berarti istilah yang digunakan sepanjang teks ini adalah *Uab Meto* atau Bahasa Dawan, namun dalam dialeg Taekas (Miomafo)

2.2. DEMOKRASI

2.2.1. Pengertian Demokrasi

Apakah artinya demokrasi? Pada hakikatnya arti dari demokrasi sebagaimana yang dipahami, selalu terdapat pada makna yang selalu merujuk pada praktek dari sistem pemerintahan, yang menganut 'dari rakyat' (*government of the people*), 'oleh rakyat' (*government by people*), dan 'pemerintahan untuk rakyat' (*government for people*). Dengan demikian makna yang terkandung pada *government of the people* adalah untuk menunjuk bahwa dalam negara demokrasi, keabsahan atau legitimasi terhadap siapa yang memerintah, selalu dapat diungkap dari *government by people*. Ungkapan ini mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, prosesnya diawasi oleh rakyat. Hal itu berbeda jika dikaitkan dengan istilah *government for people*, yang justru terkandung makna bahwa dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan, harus dilangsungkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.³

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.⁴ Tekanan ada pada peran dan fungsi warga

³Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011: 130.

⁴A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130-131

masyarakat untuk menentukan sendiri nasib pemerintahan, dan dengan demikian pula mereka dapat mengatur segala yang berkaitan erat dengan kehidupan bersama dalam masyarakat setiap hari.

Beranjak dari sistem tersebut, maka di dalam pengertian serta pemahaman mengenai demokrasi selalu terkandung tiga kunci yang lazim dikenal dengan nama *trias politica*. Prinsip yang ada dalam istilah *trias politica* adalah pola pembagian kekuasaan politik negara yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk mewujudkan ketiga jenis lembaga negara tersebut, haruslah diperhatikan di sini bahwa ketiganya selalu saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.⁵

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga tersebut bisa saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. *Trias Politica* inilah yang kemudian menjadi salah satu pilar dari demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yang luas dan bahkan mondial. Ketiga jenis lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan citra karya eksekutif, lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.⁶

2.2.2 Pendapat Para Ahli

Selama ini terungkap berbagai pemikiran mengenai gagasan sistem demokrasi. Terkadang ada yang bertentangan, namun ada pula yang hampir sama.

⁵Muliansyah A. Ways, *Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State*, 2015: hlm. 27-28

⁶Ibid

Pada uraian ini kami tidak bermaksud untuk menyampaikan semuanya. Di sini hanya disari beberapa contoh dari dunia barat dan dunia timur.

a. Joseph A. Schener mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁷ Tekanan ada pada memberi wewenang kepada warga masyarakat untuk menentukan sendiri arah dan tujuan dari kehidupan bersama tersebut.

b. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.⁸ Hal yang menjadi titik tolak adalah bagaimana warga masyarakat menentukan segala yang perlu untuk membangun masa depan yang lebih baik dan bermartabat.

c. Philippe C. Schmitter dan Tery Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan tindakan mereka yang terpilih. Hal yang justru ditekankan di sini adalah bahwa warga masyarakat sendiri yang menentukan sistem pemerintahan yang tepat bagi kepentingan bersama setiap hari.

d. Menurut Inu Kencana Syafiie, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan

⁷A Ubaedillah dan Abdul Rozak..., *Op Cit.*, hlm 132

⁸ Ibid.

tertinggi berada dalam keputusan rakyat.⁹ Inti yang menjadi pokok perhatian adalah rakyat yang menjadi sentrum untuk menentukan kehidupan setiap hari dan dengan demikian mereka juga penentu masa depan kepentingan bersama.

Rujukan para pakar di atas selalu berorientasi pada kepentingan warga masyarakat itu sendiri. Dalam arti demokrasi sesuai arti di balik kata itu selalu bergerak pada kepentingan dan kebutuhan manusia dan masyarakat yang riil. Dengan demikian manusia yang telah berkumpul dalam persekutuan tertentu, mereka jugalah sebagai penentu utama dari sistem pemerintahan menuju masa depan, sesuai dengan cita-cita hidup bersama. Secara tegas dapat dikatakan di sini juga bahwa cita-cita ditentukan oleh mereka bersama, dan diusahakan pula secara bersama-sama untuk dan demi kepentingan mereka secara bersama-sama pula.

2.2.3. Kriteria Ideal Demokrasi

Sejak ditemukannya istilah demokrasi sampai dengan dewasa ini, istilah demokrasi yang sama mempunyai tolak ukur tertentu yang unik. Unuk dalam arti bahwa sampai saat ini tidak satu pun negara di dunia yang dapat menjalankan atau memenuhinya. Hal itu termasuk pula Amerika Serikat yang selama ini mengklaim dirinya paling demokratis di seluruh dunia. Kriteria ideal itu diuraikan dengan baik dalam karya C.B Macpherson, *Democratic Theory*, Kenneth A. Megil, *The New Democratic Theory*, A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State*. Ada sepuluh (10) hal pokok yang dapat dirinci dari sumber di atas sebagai berikut:

⁹Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, 2013: 151

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Rakyat melalui pemilihan umum memilih para wakilnya yang menyuarakan kepentingan mereka. Warga masyarakat secara bersama-sama memilih para wakilnya, yang dengan cara demokratis menentukan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan sistem dan pola pemerintahan.

2. Persamaan di depan hukum.

Dalam sistem demokrasi hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Rule of law berlaku untuk seluruh warga tanpa membedakan latar belakang dan peringkat sosial apapun. Itu artinya semua orang harus taat hukum dan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan selalu berada di bawah hukum.

3. Distribusi pendapatan secara adil.

Dalam alam demokrasi tidak ada prinsip menang sendiri, selalu harus ada dialog dan relasi yang terbuka dan beradab. Ini merupakan konsekuensi logis dari persamaan di depan politik dan hukum, sekalipun demokrasi itu konsep politik namun mempengaruhi demokrasi ekonomi.

4. Kesempatan pendidikan yang sama.

Poin ini berlatarbelakangkan asumsi bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang relatif cukup tingkat pendidikannya. Hal itu disebabkan oleh karena untuk menentukan nasib sendiri, dibutuhkan kedewasaan dan keterpelajaran. Untuk itulah maka pendidikan harus mencakup seluruh lapisan masyarakat.

5. Demokrasi memiliki empat macam kebebasan.

Pertama, apa yang disebut dengan istilah kebebasan mengeluarkan pendapat, *kedua* kebebasan persuratkabaran, *ketiga* kebebasan berkumpul, dan *keempat* kebebasan beragama. Selain ke-4 kebebasan itu, kebebasan mengajukan petisi (*freedom of petition*) merupakan salah satu kebebasan dalam demokrasi.

6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi.

Rakyat harus *well-informed* mengenai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dengan informasi tersebut rakyat dapat mengontrol pemimpin-pemimpinnya bukan malah sebaliknya. Ini merupakan adagium politik dalam demokrasi “*The mass control the leaders, not the leaders controll the mass*”; jadi berlaku “*bottom up process not top down process*”.

7. Mengindahkan fatsoen.

Demokrasi memiliki tata krama politik yang harus ditaati oleh semua penganutnya, terutama dalam hal *fairness* sehingga tidak berlaku ungkapan *government knows best*. Negara harus menjamin aparatnya mempunyai sikap fair terhadap dirinya sendiri, sikap sebagai civil servant betul-betul dihayati bukan malah menjadi kekuasaan untuk menindas.

8. Kebebasan Individu.

Dalam negara demokrasi, negara sangat menjunjung tinggi privacy seseorang kecuali kalau itu merugikan orang lain. Segala sesuatu yang berkenaan dengan rahasia hidup pribadi seseorang, selalu mendapat perlindungan dan karena itu sangat dihormati dalam masyarakat.

9. Semangat Kerjasama.

Kerjasama di antara para warga negara melanggengkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi. Hal seperti ini justru merupakan sesuatu yang terpuji dan terpandang. Karena itu sudah seharusnya hal ini selalu ditumbuh-kembangkan dalam masyarakat setiap hari. Tanpa jejaring dan kerja sama yang terbuka maka manusia dan masyarakat akan macet total.

10. Hak untuk protes.

Dalam negara demokrasi harus ada mekanisme koreksi yang selalu difungsikan setiap kali terjadi penyelewengan. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Voltaire, “Du chocs des opinions jaillit la verite”.¹⁰ Protes di sini pertama dan terutama bukan rasa haus untuk memberikan kritik dan selalu bersikap negatif terhadap pemikiran orang lain. Hal pokok di sini adalah sikap toleransi pemikiran, yakni terbuka untuk menerima sesuatu yang datang dan berasal dari luar.

2.3. TEORI-TEORI DEMOKRASI

Pada bagian ini dijelaskan beberapa teori, untuk kemudian disampaikan inti dari pemahasan mengenai istilah demokrasi yang sama. Teori-teori yang disampaikan di sini selalu tergantung pada konteks pemahaman tertentu. Untuk itu yang harus diperhatikan dengan seksama adalah sikap sosial masyarakat terhadap istilah yang diberi.

a. Teori Demokrasi Klasik.

Teori ini dapat menjaga stabilitas politik demokrasi yang sangat normatif, rasionalistik, dan idealistik. Dengan demikian substansi check and balance dapat

¹⁰Servatius Rodriques dan Veronika Ina Asan Boro, *Rancangan Kegiatan Belajar Mengajar dan Bahan Bacaan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik*, hlm.61

berjalan dengan baik dan benar. Dalam beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, kontrak perjanjian setiap lembaga kenegaraan dapat memberikan nilai keadilan dan yang selalu tertib pada wilayah kewenangan setiap lembaga negara. Lembaga negara yang dibentuk itu antara lain seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dalam koridor dan prosedurnya masing-masing.

b. Teori Demokrasi Prosedural.

Teori demokrasi prosedural yang dikonseptkan oleh ahli politik adalah Schumpeter, Robert A Dahl, S.P Huntington serta Diamond, Linz dan Lipset. Inti atau maksud dari teori ini adalah agar kehidupan bersama dapat menjadi sebuah sistem politik pemerintahan yang memiliki tiga syarat pokok.

Pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik). Adapun sasarannya adalah untuk memperebutkan jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan dana paksa.

Kedua, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan-pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang di kecualikan.

Ketiga, kebebasan sipil dan politik yakni kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

c. Teori Demokrasi Substantivist.

Teori demokrasi ini lebih dikenal dengan nama 'demokrasi sustansis' berupa jiwa, kultur dan ideologi demokrasi yang mewarnai pengorganisasian internal partai politik, lembaga pemerintahan, serta perkumpulan kemasyarakatan. Demokrasi seperti ini akan bermakna bila semua masyarakat bersepakat mengenai makna demokrasi, paham dalam proses demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

d. Teori Demokrasi Sosial.

Konsep demokrasi sosial adalah kritik dan kelompok sosial kiri yang dulunya anti terhadap demokrasi yang beretopeng kapitalisme-liberal. Usul-asal dari kelompok ini terutama dari kelompok marxvian yang menganggap bahwa demokrasi politik sudah sedikit melenceng dari nilai-nilai sosial.¹¹

2.4. DEMOKRASI SEBAGAI PERKEMBANGAN BUDAYA

Dewasa ini term demokrasi itu pengertiannya tidak statik melainkan dinamik, evolusioner, organis dan dialektis. Dinamik artinya mudah berubah sesuai konteks, dan evolusioner berarti mengikuti ruang gerak alamiah yang terdapat dalam proses pemikiran manusia dan masyarakat setiap hari. Sedangkan organis artinya bergerak dalam sebuah ruang yang teratur dan dalam kapasitas sistem tertentu yang nyata. Dialektis artinya selalu terbuka untuk menerima berbagai perbedanaan yang ditunjuk dengan tidak alergis terhadap kritikan yang membangun. Kenyataan ini menyebabkan pengertian demokrasi itu kompleks

¹¹ Muliansyah A. Ways, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State: 2015 hlm 41-44

yang bertumbuh secara multiplikatif berdasarkan tantangan (*challenges*) dan jawaban (*response*).

Demokrasi terjadi di dalam sejarah masyarakat dan kebudayaan, dan mengalami evolusi di dalam perkembangan sejarah umat manusia dan masyarakat yang sama. Demokrasi sebagaimana budaya, selalu merupakan pengertian yang kompleks, yang senantiasa bergerak dari waktu ke waktu dalam tataran kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Kehidupan demokrasi yang sama itu ternyata dapat direfleksi dan dievaluasi sesuai aktualitasnya dalam kehidupan bersama yang beradab. Semuanya tertuju pada sikap tanggungjawab sosial bagi kehidupan yang nyata setiap hari. Demokrasi bersifat evaluatif dapat dilihat dari sejarah kata *demos* itu sendiri. Pada jaman Romawi ada istilah *populus* yang sama artinya dengan *demos*, namun punya arti etnis dan yuridis; sebagai contoh *Populus Romawi* (Bangsa Romawi). Demokrasi jaman itu tidak terlepas dari tujuan utamanya yakni membentuk *bonum commune*.

Di jaman pertengahan, demokrasi hanya merupakan selingan-selingan kecil di tengah rangkaian kecendrungan anti-demokratik yang kuat. Namun kesadaran akan adanya persamaan kodrat dan derajat dari semua manusia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Masa ini mengalami perubahan drastis sejak munculnya Renaissance yang memasukan unsur moralitas sekular dan kesamaan hukum namun tetap mendukung kekuasaan absolut dan kerajaan sebagaimana terungkap dalam karya-karya dari Nicollo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes.

Perjuangan di masa Renaissance mendapat format baru pada zaman pencerahan yang melahirkan pemikir-pemikir demokratik seperti ditunjukkan oleh

John Locke, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, John Stuart Mill. Sejak itu lahir konsep demokrasi modern dalam arti ajaran mengenai kedaulatan rakyat. Di dalam demokrasi modern itu persamaan derajat manusia tidak lagi ditempatkan atas dasar keagamaan, yang didasari bagaimanapun akan bersifat diskriminatif dan tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk penataan dunia secara rasional.

Perkembangan terakhir yang memberi arti lain bagi pengertian demos adalah tumbuhnya sosialisme, terutama Marxisme dan Komunisme yang membawa arti lain bagi yang mengkonotasikannya dengan kaum miskin, kaum pekerja, kelas proletar. Dengan demikian demokrasi perjuangan kelas, ia berupaya menghapuskan "*exproitation de i homme par i homme*" dan selanjutnya oleh Lenin dan Stalin dikaitkan dengan perjuangan mewujudkan masyarakat komunitas internasional. Hadirnya kekuatan komunis pasca Perang Dunia II yang begitu kuat, maka Amerika Serikat yang merasa dirinya paling demokratis memperhebat kampanye fokus dan tekanan demokrasi dengan konotasi kebebasan dan kemerdekaan. Pada pihak komunis berkembang "*liberation movement*" yang menggalang tercapainya sosialisme komunisme di internasional, namun runtuh dengan sendirinya di akhir 80-an dan awal 90-an.

Perkembangan arti kata demos yang diberi waktu tertentu pada setiap jaman yang dilaluinya dianggap sebagai proses wajar. Karena demokrasi itu sejak awalnya bukan merupakan pengertian yang serba lengkap, serba jelas, serba total dan tuntas. Perkembangan tersebut selalu terjadi dalam sejarah, tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari perkembangan budaya manusia. Semua itu menyebabkan demokrasi mencerminkan pula sifat-sifat yang ada dalam

kebudayaan. Bahwa kemudian terdapat unsur-unsur universal yang basik yang diterima sebagai ciri-ciri demokrasi, hal itu pun merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang ditempuhnya.

Demokrasi telah secara kultural dan sosial tumbuh menjadi multiple aktif dan kompleks. Dalam arti ia bertumbuh dalam wacana demografis (multiplikasi pelaku), yang bergerak secara beradab (multiplikasi sarana), dan bahkan juga secara aspirasi dan masalah (multiplikasi issues). Dari berbagai uraian di atas terungkap bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari proses diffusionisme kultural (akulturasi). Maksudnya di satu pihak perubahan itu memacu pertumbuhan kebudayaan manusia, namun juga pada pihak lain gerakan itu membawa efek-efek sampingan.

Efek sampingan yang dimaksud adalah berupa kekacauan hidup ekonomi, politik dan sosial yang terus terjadi sampai dewasa ini. Hal ini menyebabkan demokrasi tidak hanya merupakan problem dan cita-cita nasional tetapi sudah menjadi issue global yang melibatkan manusia seluruhnya sehingga sangat tinggi *nosi ambiguous* (sikap mendua).¹² Gerakan perubahan dalam citra demokrasi ternyata tidak saja menghasilkan hal-hal positif dalam arti memberi makna tertentu kepada manusia dan masyarakat, melainkan juga dapat memberi sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.

2.5. INTERAKSI SOSIAL

Maksud dari interaksi sosial di sini adalah sebuah hubungan timbal balik antar warga masyarakat, yang justru merupakan sesuatu yang teramat penting bagi

¹²Ibid hlm.66-67

kehidupan manusia dan masyarakat. Tanpa interaksi sosial, maka manusia secara pribadi dan masyarakat secara kelompok tidak mungkin bergerak untuk menanggapi berbagai perkembangan dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu interaksi sosial dapat disebut sebagai aliran kehidupan yang memberi kontribusi ruang gerak kepada manusia dan masyarakat.

1. Pengertian Interaksi Sosial

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Kenyataan ini menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain (sesama). Hubungan antar pribadi selalu dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial dalam arti luas. Adapun pengertian interaksi sosial menurut para ahli dapat dilihat seperti berikut ini.

Pertama, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya.

Kedua, interaksi sosial dapat dirumuskan sebagai suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hal yang ditekankan di sini adalah kontak atau relasi dalam pribadi manusia sebagai subyek, satu dengan lain secara teratur dan rapih. Di balik relasi atau kontak itu ada semacam teori dan fundasi yang menjadi aras terjadinya relasi dan hubungan antar pribadi tersebut.

Berdasarkan dua pengertian di atas, maka pemahaman interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Sifat hubungan atau relasi itu secara

berkala dan tidak mengenal batas waktu. Dalam arti sepanjang manusia masih hidup dan bergerak, maka ia tidak dapat mengingkari hakekat relasi dan perhubungan tersebut. Manusia dan masyarakat ada oleh karena relasi dan hubungan tersebut. Jika tidak ada relasi dan hubungan tersebut, maka sia-sia kehidupan manusia dan masyarakat.

2. Ciri-Ciri Interaksi Sosial

Pada uraian sebelumnya telah dibahas mengenai identifikasi interaksi sosial, selain disajikan juga pemikiran beberapa pakar. Berikut diberi secara garis besarnya saja, ciri-ciri dari proses interaksi sosial dalam masyarakat. Pada tempat paling pertama ciri utama interaksi sosial adalah, harus ada dua orang pelaku atau lebih. Pelaku di sini maksudnya pribadi tertentu yang memiliki otoritas dan wewenang tertentu dalam kehidupan bersama setiap hari.

Ciri yang berikut, yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan tersebut hendaknya bersifat timbal-balik antar dua atau lebih pelaku. Yang dimaksudkan di sini adalah seperti telah disebut berkali-kali mengenai sifat interaksi sosial yang terjadi terus-menerus tanpa diikat oleh waktu (yang terbatas) dan atau kepentingan tertentu.

Ciri lain adalah interaksi sosial selalu harus diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini sebetulnya sudah merangkumi apa yang telah disebut sebelumnya mengenai ciri aktif dari pribadi-pribadi manusia dan masyarakat untuk mengadakan relasi dan hubungan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu.

Ciri yang terakhir adalah setiap interaksi sosial selalu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Maksud dan tujuan inilah sebagai aliran yang memberi dukungan adanya relasi, intreraksi dan hubungan antar pribadi dalam kebersamaan masyarakat. Itu berarti sangat mustahil bagi kita untuk bicara mengenai interaksi, jika lepas dari sasaran, tujuan dan maksud tertentu. Dalam arti setiap interaksi sosial tidak pernah seperti bola liar dan berada di awas awan-awan.

3. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi apabila terpenuhi dua syarat sebagai berikut (a) kontak sosial dan (b) komunikasi.

Pertama, terjadi kontak sosial, ketika hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung. Hal seperti ini misalnya berkaitan dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi.

Kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu.

4. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Untuk melengkapi pembicaraan mengenai pengertian, ciri-ciri dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, maka berikut ini diberi beberapa hal berkenaan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial. Umumnya interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif.

a. Asosiatif

Interaksi sosial bersifat asosiatif selalu cenderung mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut.

1) Kerja sama (cooperation). Bentuk kerja sama ini selalu digunakan untuk tujuan yang telah disepakati secara bersama. Karena itu semua yang telah menempuh kata sepakat itu berusaha untuk mencapainya sebagai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya terdapat empat bentuk kerjasama, yaitu *bargaining* (tawar-menawar), *cooptation* (kooptasi), koalisi dan *joint-venture* (usaha patungan).

2) Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan.

3) Asimilasi

Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran.

4) Akulturasi

Proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.

b. Bentuk Disosiatif.

Sesuai nama maka kecenderungan bentuk ini selalu mengarah pada bentuk pemisahan. Umumnya dikenal secara umum tiga bentuk sebagai berikut.

Pertama, persaingan/kompetisi, yakni suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.

Kedua, kontravensi yakni bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditunjukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

Ketiga, konflik yakni proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat

mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.¹³

¹³ Asrul muslim, *Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis*. Vol 1, No.3, UIN Alauddin Makasar, 2013, hlm 5-7